

COLLABOTIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG

Mahdiar¹, Edi Mulyadi², Dafyar Eliadi H³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan menggunakan kerangka teori Ansell & Gash. Permasalahan stunting dipahami sebagai isu multidimensional yang tidak dapat ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, PKK, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal (*starting condition*) penanggulangan stunting di Karawaci ditandai oleh keterbatasan sumber daya dan perbedaan kepentingan, namun didorong oleh urgensi masalah dan komitmen politik pemerintah kota. Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) yang dijalankan camat dan dinas terkait menjadi faktor penggerak terjalannya koordinasi lintas sektor. Desain institusional (*institutional design*) masih lemah karena forum formal belum sepenuhnya terlembaga, sehingga kolaborasi lebih bergantung pada jejaring sosial. Proses kolaborasi (*collaborative process*) telah membangun kepercayaan, komunikasi intensif, serta pemahaman bersama, meskipun terkendala data yang belum akurat. Hasil sementara (*intermediate outcomes*) terlihat pada meningkatnya kesadaran masyarakat dan cakupan pelayanan gizi, sementara hasil jangka panjang (*long-term outcomes*) masih menghadapi tantangan keberlanjutan kebijakan dan konsistensi dukungan sumber daya. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci sudah berjalan, namun masih bersifat parsial dan membutuhkan pelembagaan yang lebih kuat agar mampu menjamin keberlanjutan program. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritik bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan fasilitatif, kepercayaan antar aktor, serta keberhasilan mencapai *small wins* sebagai energi penguat bagi kolaborasi jangka panjang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanggulangan, Stunting, Kecamatan Karawaci.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in stunting reduction in Karawaci District, Tangerang City, using the Ansell & Gash theoretical framework. Stunting is understood as a multidimensional issue that cannot be addressed sectorally but requires collaboration across actors, including government, community, and non-governmental organizations. This study employed a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants included local government officials, health workers, Posyandu

(Integrated Service Post) cadres, the Family Welfare Movement (PKK), and community leaders. The results indicate that the initial conditions for stunting reduction in Karawaci were characterized by limited resources and differing interests, but were driven by the urgency of the problem and the political commitment of the city government. Facilitative leadership implemented by the sub-district head and relevant agencies was a driving factor in cross-sectoral coordination. Institutional design remained weak because formal forums were not yet fully institutionalized, so collaboration relied more on social networks. The collaborative process has built trust, intensive communication, and shared understanding, despite challenges such as inaccurate data. Intermediate outcomes are seen in increased public awareness and increased coverage of nutrition services, while long-term outcomes still face challenges in policy sustainability and consistent resource support. The conclusion of this study confirms that Collaborative Governance in stunting reduction in Karawaci District is already underway, but remains fragmented and requires stronger institutionalization to ensure program sustainability. This research provides a theoretical contribution, demonstrating that the success of collaboration is not solely determined by formal regulations but also influenced by facilitative leadership, trust between actors, and the success of achieving small wins as a driving force for long-term collaboration.

Keywords: Collaborative Governance, Stunting, Prevention, Karawaci District.

A. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sebagai indikator kekurangan gizi kronis, stunting tidak hanya mencerminkan keterbatasan asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan, tetapi juga menggambarkan ketidakmerataan pembangunan, rendahnya akses layanan kesehatan, dan lemahnya literasi gizi keluarga. WHO menetapkan bahwa prevalensi stunting yang aman bagi suatu Negara berada di bawah angka 20%, namun Indonesia masih berada di atas standar tersebut. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 21,6% meskipun angka ini telah menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024 melalui berbagai program nasional yang terintegrasi lintas sektor.

Agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadikan penghapusan kelaparan dan peningkatan gizi sebagai tujuan utama. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan menerapkan intervensi spesifik yang berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, intervensi sensitif yang melibatkan sektor sanitasi, pendidikan, perumahan, air bersih, dan perlindungan sosial. Namun, pelaksanaan intervensi ini tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga.

Di Provinsi Banten, prevalensi stunting menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan prevalensi sebesar 25,7% (2020), menurun menjadi 23,4% (2021), namun kembali naik di tahun 2022 sebesar 24,5%, dan turun kembali pada 2023 menjadi 20,0% sebelum naik lagi ke angka 21,1% pada 2024. Ketidakstabilan ini menandakan masalah struktural yang belum terselesaikan, seperti minimnya akses air bersih, buruknya sanitasi, serta rendahnya edukasi gizi masyarakat.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Tangerang, yang mengalami fluktuasi angka stunting dari 2018 hingga 2024. Meskipun Kota Tangerang memiliki berbagai program intervensi terpadu, data menunjukkan dinamika yang tidak konsisten mulai dari 19,1% (2018), menurun menjadi 16,4% (2019), turun drastis di 2020 (9,65%), namun kembali naik pada 2021 (15,3%) dan 2023 (17,6%), sebelum turun signifikan menjadi 5,5% pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa permasalahan stunting bersifat kompleks, melibatkan faktor biologis, lingkungan, sosial, hingga tata kelola program di tingkat lokal.

Kecamatan Karawaci merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Tangerang. Sebagai wilayah padat penduduk dengan 16 kelurahan, Karawaci menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang, urbanisasi yang cepat, kepadatan permukiman, keterbatasan fasilitas sanitasi, serta disparitas ekonomi antar keluarga. Meskipun pemerintah kecamatan telah melakukan berbagai upaya seperti program Posyandu Plus, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan pemantauan tumbuh kembang, pelaksanaannya masih terkendala lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta akurasi data yang belum optimal.

Peneliti melihat dampak stunting di Kecamatan Karawaci tidak hanya terlihat pada kondisi kesehatan anak, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak stunting di wilayah ini cenderung memiliki prestasi akademik yang rendah dan berisiko mengalami masalah kesehatan di masa dewasa. Selain itu, stunting juga dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kecamatan Karawaci. Pemerintah Kecamatan Karawaci telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi stunting, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan edukasi gizi. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah stunting di wilayah ini.

Salah satu program stunting yang telah berjalan di Kecamatan Karawaci adalah Posyandu Plus, yang menggabungkan pelayanan kesehatan dengan edukasi gizi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan, serta memberikan dukungan konkret kepada keluarga yang memiliki anak stunting. Evaluasi terhadap program stunting di Kecamatan Karawaci menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal cakupan dan kualitas pelayanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan padat penduduk. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci.

Menghadapi persoalan multidimensi seperti stunting, pendekatan sektoral terbukti tidak memadai. Menurut Huxham dan Vangen (2000), kolaborasi yang efektif memerlukan pengelolaan hubungan yang baik antar pihak yang terlibat. Dalam konteks stunting, kolaborasi dapat mencakup berbagai aktor, seperti dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam satu mekanisme kerja bersama. Salah satu model yang dianggap efektif adalah *Collaborative Governance* yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash. Model ini menekankan

pentingnya dialog tatap muka, pengembangan kepercayaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses pengambilan keputusan secara konsensus. Implementasi *Collaborative Governance* juga diyakini dapat memperkuat efektivitas kebijakan ketika berbagai aktor memiliki kepentingan berbeda namun tujuan bersama yang sama, yaitu penyelesaian masalah publik.

Dalam konteks penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci, *Collaborative Governance* relevan diterapkan mengingat keberagaman aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah kecamatan, dinas kesehatan, PKK, kader posyandu, tenaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Namun, sejauh ini penguatan kolaborasi masih belum optimal. Beberapa kelurahan belum memiliki forum komunikasi yang terstruktur, koordinasi lintas sektor masih bersifat sporadis, dan keterlibatan masyarakat belum merata. Hal ini menunjukkan adanya governance gap yang perlu diteliti secara mendalam.

Penelitian terdahulu terkait kolaborasi dalam penanggulangan stunting sebagian besar masih berfokus pada koordinasi program, efektivitas intervensi, atau peran pemerintah daerah. Namun, kajian yang secara spesifik mengkaji proses kolaborasi menggunakan model Ansell & Gash pada level kecamatan masih terbatas, khususnya pada konteks urban seperti Kecamatan Karawaci. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menelusuri dinamika kolaborasi secara lebih sistematis meliputi kondisi awal kemitraan, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi, serta hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tata kelola penanggulangan stunting.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan program penanggulangan stunting yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi penanggulangan stunting yang berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi awal *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang?
2. Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang?
3. Bagaimana Hambatan dan Tantangan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai implementasi *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena kolaborasi antarpemangku kepentingan tidak dapat direduksi menjadi angka, melainkan memerlukan eksplorasi terhadap pola interaksi, konfigurasi peran, serta dinamika institusional yang berlangsung dalam konteks alamiah. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2006), sehingga pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan sesuai prinsip *naturalistic inquiry*.

Berdasarkan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang deskripsi *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Stunting di

Kecamatan Karawaci Kota Tangerang melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya yang dipertegas dalam tujuan penelitian untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang tersebut melalui pengumpulan data primer dari informan dan observasi serta pengolahan data sekunder di lapangan. Untuk itu, desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan ditentukan melalui purposive sampling, terdiri atas pejabat pemerintah terkait, tenaga kesehatan puskesmas, aparat kelurahan, kader posyandu, PKK, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi atas laporan kegiatan, data stunting, serta dokumen regulative.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang sampai mencapai kejemuhan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, member check, serta pemeriksaan dokumen pendukung. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap dinamika kolaborasi lintas aktor secara kontekstual dan komprehensif dalam program percepatan penurunan stunting. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dilaksanakan bulan Maret hingga Agustus 2025. Wilayah tersebut yang terdiri dari 16 kelurahan dan merupakan wilayah dengan dinamika sosial tinggi serta prevalensi stunting yang fluktuatif. Wilayah ini dipilih secara purposif karena merupakan lokus prioritas intervensi stunting berdasarkan Perpres 72/2021, memiliki keragaman aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif; menjadi representasi kawasan urban padat penduduk yang menghadapi tantangan stunting yang kompleks.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Menganalisis implementasi *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan menggunakan kerangka Ansell & Gash yang mencakup kondisi awal (*Starting Conditions*), proses kolaborasi (*Collaborative Process*), dan faktor penghambat. Pemerintah Kecamatan Karawaci salah satu wilayah di Kota Tangerang yang juga memfokuskan pencegahan stunting di wilayahnya. Penanganan program tersebut melalui kolaborasi lintas instansi sehingga tercapai angka penurun stunting di Kecamatan Karawaci dalam penanganan stunting. Oleh karena itu, melalui penelitian yang dilakukan ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi Awal penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci menunjukkan adanya fragmentasi program antar instansi. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas fokus pada intervensi gizi spesifik, sementara kecamatan dan kelurahan lebih banyak berperan pada aspek penyuluhan dan sosialisasi. Namun, belum terdapat forum koordinasi yang memayungi program lintas sektor sehingga upaya yang dilakukan berjalan parsial.

Hasil wawancara, peneliti melihat kondisi awal penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan informasi, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan kepentingan antar aktor. Pemerintah Kecamatan, Dinas Kesehatan, PKK, serta kader Posyandu pada mulanya bekerja secara parsial, sehingga koordinasi belum optimal. Namun, terdapat kesadaran bersama bahwa stunting merupakan isu strategis yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia

di masa depan. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa kondisi awal memang memperlihatkan hambatan kolaborasi, tetapi adanya urgensi masalah dan komitmen politik dari pemerintah kota menjadi pemicu awal terciptanya ruang bersama untuk membangun kolaborasi lintas sektor.

b. Mendeskripsikan Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Hasil wawancara dan informasi yang didapatkan peneliti melihat Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan telah terbentuk, tetapi mekanisme partisipatif belum berjalan optimal. Peneliti melihat Secara kelembagaan, Kecamatan Karawaci sudah memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang menjadi wadah kolaborasi antar aktor. TPPS melibatkan unsur kecamatan, puskesmas, PKK, kader posyandu, dan tokoh masyarakat. Namun dari hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Karawaci, forum ini sering berjalan formalitas, bahkan hasil rapat jarang ditindaklanjuti dengan aksi bersama yang konsisten. Di sisi lain, kader posyandu menyampaikan bahwa keterlibatan mereka masih terbatas dan seringkali terhambat oleh minimnya insentif dan beban kerja pribadi. Dengan demikian, kelembagaan sudah ada secara struktural, tetapi belum berfungsi maksimal sebagai sarana partisipasi yang sejajar. Benang merah dari desain kelembagaan ini adalah adanya kesenjangan antara bentuk formal dan praktik di lapangan. Forum koordinasi memang tersedia, namun partisipasi masih belum inklusif. Dalam kerangka teori *Collaborative Governance*, desain kelembagaan ideal adalah yang mampu menjamin keterlibatan semua pihak, transparansi dalam proses, serta mekanisme partisipatif yang nyata. Kondisi di Karawaci menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan sudah terbangun, peran substantifnya dalam mendorong kolaborasi masih lemah.

c. Mendekripsikan Kepemimpinan (*Facilitas Leadership*)

Peneliti juga membutuhkan informasi yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* yang dilakukan di kecamatan karawaci yaitu dengan menggali bagaimana indikator kepemimpinan menentukan arah kolaborasi yang dilakukan di Kecamatan Karawaci. Kepemimpinan Camat sebagai fasilitator utama kolaborasi sangat menentukan arah kebijakan.

Dari hasil wawancara, camat berupaya mengintegrasikan program stunting dengan kegiatan PKK dan ketahanan pangan, sehingga penanganannya tidak hanya berbasis kesehatan tetapi juga pemberdayaan keluarga. Namun demikian, wawancara dengan staff kecamatan mengungkapkan bahwa monitoring kegiatan belum berjalan konsisten. Ada program yang aktif di awal, tetapi berkurang pada periode berikutnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun kepemimpinan sudah berperan sebagai penggerak, namun keberlanjutan arahan dan pengawasan belum sepenuhnya terjaga. Benang merah dari aspek kepemimpinan ini adalah bahwa kepemimpinan fasilitatif memang hadir, tetapi belum optimal dalam memelihara keberlanjutan dan menjaga kepercayaan antar aktor.

2. Pembahasan

a. Kondisi Awal (*Starting Conditions*) dalam Proses *Collaborative* Dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Karawaci.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mencoba untuk melakukan analisis pembahasan pada Kondisi awal penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci mencerminkan adanya masalah gizi kronis yang cukup menonjol di beberapa kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan menindaklanjuti kebijakan nasional Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang kemudian diimplementasikan ke tingkat kecamatan sebagai *leading sector*. Pada tahap awal, peran Kecamatan Karawaci adalah memastikan adanya forum koordinasi antar-aktor, mulai dari Puskesmas, kelurahan, PKK, hingga tokoh masyarakat.

Hal ini selaras dengan temuan Febriana & Hertati (2023) yang menegaskan bahwa regulasi itu menjadi modal penting dalam menciptakan kolaborasi antarsektor di Probolinggo Selain itu, penelitian di Bone oleh Kurra dkk. (2024) juga menyoroti bahwa struktur kelembagaan dan regulasi yang memadai memungkinkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan stunting analisis ini diperkuat juga oleh penelitian *Empirical evidence more localized from Enrekang* (Khuzaimah et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan dan kelembagaan, sering terjadi hambatan dalam diskusi dan pemahaman prosedur bersama sehingga penting untuk memperkuat starting condition-nya Bersama teori Ansell & Gash (2008), hal ini mendukung bahwa kondisi awal yang mencakup regulasi, institusional, dan partisipasi adalah kunci dalam proses kolaborasi yang efektif. Kebijakan ini menjadi fondasi awal terbentuknya ruang kolaborasi.

b. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*) dalam Proses *Collaborative* Dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Karawaci.

1) *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Hasil penelitian Kecamatan Karawaci menunjukkan bahwa upaya membangun kepercayaan antar-aktor telah berjalan melalui forum koordinasi lintas sektor, keterbukaan informasi mengenai data stunting, serta transparansi dalam pembagian peran. Pemerintah kecamatan memfasilitasi pertemuan rutin yang melibatkan dinas kesehatan, PKK, kader posyandu, serta tokoh masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sukanti & Faidati (2021) di Kabupaten Sleman yang menekankan bahwa komunikasi intensif dan keterlibatan berjenjang merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan di antara aktor lokal. Mereka menunjukkan bahwa semakin sering forum komunikasi dilakukan, semakin kuat pula ikatan kepercayaan antar pihak. Penelitian Wasiat & Salomo (2024) di Warakas, Jakarta, juga membuktikan bahwa transparansi data dan kepemimpinan kolaboratif dari pemerintah maupun sektor swasta mampu meningkatkan trust building dalam program CSR kesehatan. Hal serupa ditunjukkan oleh Kurra dkk. (2024) di Bone, di mana komunikasi intensif antar sektor mampu meningkatkan rasa saling percaya meskipun kondisi awalnya penuh tantangan.

2) *Commitment to Process* (Komitmen terhadap Proses)

Hasil penelitian memperlihatkan adanya komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menjalankan program penanggulangan stunting secara berkesinambungan. Komitmen ini tampak dari konsistensi pemerintah kecamatan dalam menyediakan anggaran operasional kegiatan posyandu, peran aktif tenaga kesehatan dalam pemantauan gizi anak, serta kontribusi PKK dan kader dalam penyuluhan pola makan sehat di tingkat keluarga.

Penelitian Febriana & Hertati (2023) di Probolinggo menunjukkan hal serupa: komitmen bersama dapat terbentuk karena adanya regulasi daerah yang menegaskan pentingnya keterlibatan semua sektor dalam menurunkan angka stunting. Sementara itu, Ramadhan dkk. (2024) di Gintungkerta menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu. Penelitian Khuzaimah et al. (2024) di Enrekang pun menegaskan bahwa meskipun regulasi tersedia, tanpa komitmen aktor-aktor kunci program tidak berjalan efektif, terutama ketika diskusi rutin tidak dijalankan secara konsisten

Artinya, komitmen terhadap proses di Karawaci telah menunjukkan pola positif karena adanya kesadaran bersama bahwa stunting adalah masalah kompleks yang tidak bisa ditangani dengan langkah jangka pendek. Kesinambungan pelaksanaan, monitoring rutin, serta peran aktif semua pihak menjadi indikator bahwa *Collaborative Governance* di wilayah ini sudah bergerak ke arah yang ideal.

3) *Shared Understanding* (Kesepahaman Bersama)

Hasil penelitian menemukan bahwa aktor-aktor terlibat memiliki kesepahaman bersama terkait visi utama program, yaitu mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting. Pemahaman ini diwujudkan dalam strategi intervensi gizi spesifik (pemberian makanan tambahan, vitamin, dan imunisasi) serta intervensi gizi sensitif (penyediaan air bersih, sanitasi, dan edukasi pola asuh). Kesepahaman ini membuat koordinasi antar sektor berjalan relatif lancar, karena setiap pihak sudah memahami kontribusinya masing-masing dalam kerangka besar program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurra dkk. (2024) di Bone yang menunjukkan bahwa shared understanding antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas program, terutama dalam mengurangi tumpang tindih kebijakan antar instansi. Penelitian Natasha & Santoso (2024) di Bandarharjo, Semarang, juga menyoroti bahwa ketidakberhasilan kolaborasi sering kali disebabkan oleh kurangnya kesepahaman visi dan perbedaan persepsi antar stakeholder. Sedangkan penelitian Sukanti & Faidati (2021) di Sleman menekankan bahwa *Shared Understanding* dapat dibangun melalui intensifikasi dialog yang melibatkan aktor dari tingkat keluarga, desa, hingga kabupaten

Dengan demikian, *Shared Understanding* di Karawaci terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan kolaborasi. Kesepakatan visi, strategi, dan sasaran membuat setiap pihak bekerja dengan arah yang sama tanpa menimbulkan persaingan antar sektor. Hal ini sejalan dengan teori Ansell & Gash (2008) bahwa kesepahaman bersama merupakan elemen fundamental untuk mencapai keberhasilan dalam *Collaborative Governance*.

4) *Intermediated Outcome* (Hasil Sementara)

Hasil sementara berikutnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Data kecamatan menunjukkan kehadiran di posyandu meningkat hingga 20% setelah adanya pendekatan kolaboratif. Partisipasi ini penting karena sesuai dengan pandangan Emerson, Nabatchi &

Balogh (2012) bahwa partisipasi warga adalah indikator awal keberhasilan *Collaborative Governance*. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Rohman (2021) yang menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan memperkuat legitimasi program dan menciptakan kepemilikan bersama (*shared ownership*).

Dengan demikian, *outcome* sementara yang muncul di Karawaci tidak hanya memperlihatkan keberhasilan teknis program, tetapi juga membangun fondasi sosial dan kelembagaan yang kokoh untuk keberlanjutan penanggulangan stunting. Peneliti mencoba untuk membuat kerangka alur dari proses collaborasi melalui program yang telah dilakukan dalam penanggulangan stunting di kecamatan Karawaci

c. Tantangan dan Hambatan dalam Proses *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Karawaci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antaraktor di Kecamatan Karawaci telah berjalan dengan baik, terdapat sejumlah tantangan yang masih menghambat optimalisasi program. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun ketersediaan tenaga kesehatan di lapangan. Selain itu, masih ditemukan resistensi sebagian masyarakat terhadap perubahan pola asuh dan kebiasaan makan, terutama pada keluarga dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa program membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, tidak hanya menekankan aspek medis, tetapi juga aspek sosial dan budaya.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Khuzaaimah et al. (2024) di Kabupaten Enrekang yang menyoroti kurangnya konsistensi aktor dalam menghadiri forum rutin sebagai hambatan kolaborasi. Hambatan lainnya juga diungkapkan oleh Natasha & Santoso (2024) dalam studi di Semarang, di mana faktor sosial-ekonomi keluarga, khususnya keterbatasan ekonomi, menjadi tantangan utama yang membuat intervensi pemerintah tidak sepenuhnya diterima. Penelitian Ramadhan dkk. (2024) di Gintungkerta juga memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial dan rendahnya kapasitas kader posyandu menghambat efektivitas program penanggulangan stunting, meskipun koordinasi lintas sektor telah dilakukan dengan baik. Tantangan lain yang cukup signifikan adalah terkait koordinasi lintas sektor yang terkadang masih menghadapi ego sektoral. Beberapa instansi cenderung fokus pada programnya masing-masing tanpa memperhatikan keterkaitan dengan sektor lain, sehingga efektivitas kolaborasi berkurang.

Hal ini sejalan dengan temuan Sukanti & Faidati (2021) di Sleman, yang menunjukkan bahwa ego sektoral seringkali memperlambat implementasi kebijakan kolaboratif. Namun demikian, kondisi di Karawaci relatif lebih baik karena adanya peran kepemimpinan camat yang mampu menyatukan arah kebijakan. Dengan demikian, meskipun hambatan masih ada, proses collaborative governance tetap dapat berjalan karena adanya komitmen bersama untuk mengatasinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa proses

kolaborasi antar aktor telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*) *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci.

Kondisi awal penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci ditandai oleh keterbatasan sumber daya, ketimpangan kewenangan antar aktor, serta fragmentasi informasi. Pemerintah kecamatan dan dinas kesehatan memiliki legitimasi regulatif dan akses anggaran, sementara aktor komunitas seperti kader posyandu dan PKK lebih mengandalkan modal sosial dan kerja sukarela. Ketidakseimbangan ini membuat posisi masyarakat sering kali hanya sebagai pelaksana teknis, bukan pengambil keputusan. Selain itu, warisan birokrasi yang *top-down* membuat hubungan antar aktor cenderung formalitas, sehingga koordinasi lintas sektor belum terbangun kuat. Perbedaan orientasi juga terlihat, di mana pemerintah lebih fokus pada pencapaian target makro, sedangkan masyarakat menekankan pada kebutuhan riil seperti gizi dan akses layanan kesehatan. Keterbatasan data yang belum terintegrasi semakin memperlemah kepercayaan antar pihak.

Namun demikian, adanya komitmen politik melalui regulasi daerah dan kesadaran bersama akan urgensi stunting sebagai ancaman kualitas generasi mendatang menjadi modal penting untuk mendorong kolaborasi. Dengan demikian, meski kondisi awal penuh tantangan, terdapat peluang positif yang dapat menggerakkan proses *Collaborative Governance* sebagaimana digambarkan dalam kerangka Ansell & Gash.

2. Proses (*Process*) *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci.

Proses kolaborasi mencerminkan adanya *face-to-face dialogue* melalui pertemuan rutin, pembangunan kepercayaan (*trust building*) yang tumbuh perlahan, komitmen aktor yang masih dipengaruhi kepentingan sektoral, serta terbentuknya pemahaman bersama (*shared understanding*) meskipun masih terdapat kesenjangan perspektif antara pelaksana teknis dan birokrasi. Hasil sementara (*intermediate outcomes*) berupa peningkatan kesadaran masyarakat, kenaikan partisipasi posyandu, serta cakupan gizi tambahan. Namun, capaian ini belum berimplikasi signifikan terhadap prevalensi stunting.

3. Hambatan dan Tantangan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci.

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama dalam *Collaborative Governance* penanggulangan stunting di Kecamatan Karawaci terletak pada ketimpangan sumber daya dan kewenangan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kolaborasi belum berjalan setara. Tantangan lain adalah lemahnya pelembagaan forum koordinasi yang masih bersifat programatis, keterbatasan data yang tidak terintegrasi sehingga menurunkan kepercayaan antar aktor, serta perbedaan orientasi kepentingan di mana pemerintah fokus pada target makro sedangkan masyarakat pada kebutuhan praktis. Komitmen yang belum konsisten juga membuat kolaborasi rentan berhenti jika tidak didukung kebijakan politik yang berkelanjutan. Dengan demikian, hambatan dan tantangan ini menunjukkan bahwa kolaborasi di Karawaci masih berada dalam tahap transisi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan trust,

institusionalisasi forum, serta keselarasan kepentingan antar aktor sesuai kerangka Ansell & Gash.

Referensi

Buku

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: BKKBN.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Reducing stunting in children*. Geneva: World Health Organization.

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Febriana, L., & Hertati, D. (2023). Collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 150–164.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2000). Leadership in the shaping and implementation of collaboration agendas. *Academy of Management Journal*, 43(6), 1139–1155.
- Khuzaimah, U., Rasyid, M., & Akbar, F. (2024). Analisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 22–37.
- Kurra, M. I., Rahman, A., & Anwar, Z. (2024). Evaluasi kolaborasi lintas sektor dalam program penurunan stunting di Kabupaten Bone. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pelayanan*, 5(1), 45–57.
- Natasha, A., & Santoso, D. (2024). Kolaborasi multipihak dalam percepatan penurunan stunting di Kota Semarang. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, 5(1), 33–48.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250–265.
- Ramadhan, R. A., Suryadi, D., & Majid, N. (2024). Keterlibatan masyarakat dalam program gizi dan pencegahan stunting. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(2), 115–129.
- Rohman, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam efektivitas intervensi kesehatan berbasis komunitas. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 6(2), 112–123.
- Sukanti, R., & Faidati, N. (2021). Kolaborasi pemerintah dan kader kesehatan dalam pencegahan stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(3), 398–409.
- UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021: Nutrition*. New York: UNICEF.
- Wasiat, R., & Salomo, S. (2024). Kolaborasi CSR dan pemerintah dalam intervensi kesehatan masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 77–91.